



86 Kopdes Merah Putih Terbentuk di Sleman

Menkop Targetkan 80.000 Unit Berdiri Bulan Juni

SLEMAN, TRIBUN - Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang merupakan program inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto, telah dilakukan percepatan di Kabupaten Sleman. Saat ini 86 kalurahan di Bumi Sembada telah menyelenggarakan musyawarah kalurahan khusus (Muskalsus) sebagai syarat pendirian Koperasi.

Pemerintah Kabupaten Sleman pun mendampingi tahap pengurusan legalitas badan hukumnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Tina Hastani, mengatakan, seluruh Kalurahan di Kabupaten Sleman telah menyelesaikan Muskalsus sebagai syarat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Adapun kopdes merah putih di Kalurahan dibentuk melalui tiga cara.

Pertama bisa dengan membentuk koperasi baru, kedua revitalisasi dan ketiga pengembangan koperasi yang sudah ada. Tiga cara tersebut dikomunikasikan di tingkat Kalurahan melalui Muskalsus dan dipilih kesepakatannya menggunakan cara yang mana.

"Alhamdulillah seluruh Kalurahan sudah melaksanakan muskalsus. Dengan hasil, 83 Kalurahan memilih cara pembentukan koperasi yang baru. Sedangkan tiga Kalurahan memilih pengembangan koperasi yang sudah ada," kata Tina, Rabu (4/6).

Tiga kalurahan yang memilih untuk mengembangkan koperasi yang sudah ada, an-

PERCEPATAN

- 86 kalurahan di Bumi Sembada telah menyelenggarakan musyawarah kalurahan khusus (Muskalsus) sebagai syarat pendirian Koperasi.
- Pemerintah Kabupaten Sleman pun mendampingi tahap pengurusan legalitas badan hukumnya.
- Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan ada 80.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terealisasi pada Juni 2025.

tara lain Kalurahan Sinduadi, Mlati, Sidomulyo Godean dan Jogotirto Berbah. Kalurahan Sinduadi, memilih untuk mengembangkan koperasi simpan pinjam (KSP) eks BKM yang sebelumnya sudah ada. Sidomulyo memilih untuk mengembangkan koperasi Gapoktan yang selama ini telah berjalan. Sedangkan di Jogotirto pengembangan KSP Kalurahan yang sudah eksis.

Selain cara pembentukan, muskalsus juga membentuk jajaran susunan kepengurusan, mulai dari Ketua hingga pengawas koperasi. Pengembangan koperasi merah putih ini mencakup pendirian gerai layanan multifungsi seperti kantor koperasi, sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, cold storage atau pergudangan, serta logistik desa disesuaikan dengan po-

tensi lokal masing-masing wilayah.

Terkait nama koperasi, dibuat hampir seragam sesuai dengan nama Kalurahan masing-masing. Hal ini mengikuti panduan dari Surat Edaran Gubernur DIY. Nah, untuk mempercepat proses legalitas, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Sleman telah bekerja sama dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Sleman dalam memfasilitasi pembuatan Akta Pendirian (Badan Hukum) koperasi.

Pemerintah melalui APBD juga menanggung biaya notaris dan menyediakan layanan desk pendampingan pada 11-12 Mei 2025. "Diharapkan tanggal 12 Juni semua koperasi sudah berbadan hukum dan insya Allah nanti akan diserahkan badan hukum koperasi secara keseluruhan oleh Bupati Sleman," katanya.

Sebagai bagian dari program nasional, Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) juga telah mengalokasikan dana untuk 80 koperasi sebagai proyek percontohan atau piloting. Di Kabupaten Sleman, Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Sinduadi dan Kalurahan Tamanmartani terpilih sebagai kandidat piloting. Proses verifikasi oleh tim LPDB telah dilakukan pada minggu kedua bulan Mei 2025.

"Jadi untuk Sinduadi dan Tamanmartani saat ini sudah masuk dalam verifikasi LPDB

dari Kementerian Koperasi," kata Tina. Ia berharap terbentuknya koperasi-koperasi ini, dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa dan menciptakan sistem ekonomi gotong royong yang tangguh dan berkelanjutan.

Tantangan

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan ada 80.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terealisasi pada Juni 2025. Dari jumlah tersebut, 60.806 unit sudah berhasil dibentuk hingga 28 Mei tahun ini. Dia optimis, 80.000 unit Kopdes bisa mengatasi masalah di tingkat desa atau kelurahan.

Misalnya, panjangnya rantai distribusi, keterbatasan permodalan, dominasi tengkulak yang merugikan petani dan konsumen. "Target sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih ini untuk mengatasi masalah di desa atau kelurahan. Mulai dari panjangnya rantai distribusi, keterbatasan permodalan, dominasi tengkulak yang merugikan petani dan konsumen, serta memutus rantai rentenir dan pinjol ilegal," ujar Budi Arie saat Peluncuran dan Dialog Percepatan Musdesus Pembentukan Kopdes/kel Merah Putih di Maluku Utara, Rabu (4/6).

Meski begitu, Budi mengaku masih ada sejumlah tantangan dalam mewujudkan 80.000 Kopdes Merah Putih. Beberapa di antaranya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif akan pentingnya koperasi. (rif)